

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teori

1. Grand Teori

a. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengelola hubungan antara perusahaan dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Stakeholders* adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional yang hanya fokus pada pemegang saham dengan memperluas perhatian kepada semua pihak yang terkait dengan operasi perusahaan (Freeman et al., 2018).

Teori *stakeholder* muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk menangani masalah etika dan tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin kompleks. Pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984, teori ini menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perusahaan. Latar belakang ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada semua pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Miles, 2019).

Komponen utama dalam teori *stakeholder* mencakup *stakeholder* internal seperti karyawan dan manajemen, serta *stakeholder* eksternal seperti pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemegang saham. Teori ini menggaris bawahi pentingnya memahami siapa saja yang termasuk dalam kategori *stakeholder*, apa kepentingan mereka, dan bagaimana perusahaan dapat memenuhi ekspektasi mereka. Pemahaman ini esensial untuk menciptakan strategi manajemen yang efektif dan berkelanjutan (Niekerk & Getz, 2019).

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholder* yang relevan. Pencapaian keseimbangan antara tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi fokus utama agar perusahaan dapat mencapai keberlanjutan bisnis. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam menjaga reputasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Miles, 2019).

Hubungan dan interaksi antar *stakeholder* merupakan aspek kunci dalam teori ini. Proses ini melibatkan komunikasi yang transparan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ekspektasi *stakeholder* terpenuhi. Pendekatan yang partisipatif memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan konflik lebih awal serta mengembangkan solusi yang efektif (Richter & Dow, 2017).

Potensi konflik sering kali tidak dapat dihindari dalam interaksi dengan *stakeholder*. Perbedaan kepentingan antara *stakeholder* internal dan eksternal dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan, misalnya pemegang saham mungkin lebih fokus pada keuntungan jangka pendek sementara karyawan

menginginkan kondisi kerja yang lebih baik. Tahapan penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan perusahaan mengambil pendekatan yang seimbang dan adil, memastikan bahwa semua kepentingan *stakeholder* dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (Freeman et al., 2020).

Teori *stakeholder* dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti manajemen proyek, pendidikan tinggi, dan industri energi. Mengidentifikasi dan mengelola hubungan dengan semua pihak yang terlibat seperti peserta, sponsor, dan komunitas lokal untuk memastikan kesuksesan acara sangat membantu dalam pengambilan keputusan bagi manajemen acara. Pendekatan ini membantu dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dan mengurangi potensi konflik (Godam et al., 2019).

Penerapan teori *stakeholder* menghasilkan peningkatan kolaborasi, pengurangan konflik, peningkatan reputasi perusahaan, dan keberlanjutan jangka panjang. Tantangan muncul dalam hal mengelola berbagai ekspektasi *stakeholder* yang mungkin bertentangan. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Harrison & Wicks, 2019).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kekuatan teori *stakeholder* terletak pada kemampuannya untuk menciptakan nilai jangka panjang dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Kelemahan dari teori ini termasuk kompleksitas dalam mengelola berbagai kepentingan *stakeholder* dan potensi konflik yang mungkin muncul. Pengembangan strategi yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk mengatasi kelemahan ini (Pedrini & Ferri, 2019).

Teori *stakeholder* berhubungan erat dengan teori etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Integrasi berbagai perspektif ini memperkaya pemahaman tentang peran perusahaan dalam masyarakat dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Pendekatan holistik ini membantu dalam menciptakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Bonnafous-Boucher & Rendtorff, 2016).

Secara keseluruhan, teori *stakeholder* menawarkan pendekatan yang komprehensif dan etis dalam pengelolaan hubungan perusahaan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Teori ini membantu perusahaan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan semua *stakeholder*. Studi empiris tentang penerapan teori *stakeholder* dalam berbagai industri juga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang manfaat dan tantangan yang dihadapi.

b. Teori Agency

Teori *agency* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik atau pemberi tugas) dan agen (manajer atau pelaksana tugas). Teori ini sangat penting karena membantu dalam memahami dan mengelola konflik kepentingan serta masalah yang muncul dari hubungan tersebut, terutama terkait asimetri informasi dan biaya *agency* (Moloi & Marwala, 2020).

Teori *agency* terdiri dari beberapa komponen utama: prinsipal, agen, kontrak yang mengatur hubungan mereka, asimetri informasi, dan biaya *agency*. Prinsipal adalah pihak yang memiliki aset atau kepentingan dan

mendelegasikan tugas kepada agen, sementara agen melaksanakan tugas tersebut atas nama prinsipal. Kontrak antara keduanya mencakup mekanisme insentif dan pemantauan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan prinsipal yang dapat menyebabkan perilaku oportunistik oleh agen. Biaya *agency* mencakup biaya pemantauan, pemberian insentif dan risiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam hubungan prinsipal-agen (Bendickson et al., 2016).

Hubungan antara prinsipal dan agen sering kali ditandai dengan asimetri informasi. Agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal dapat menyebabkan agen bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka dan bukan kepentingan prinsipal. Prinsipal menggunakan berbagai mekanisme pemantauan dan insentif untuk menyelaraskan kepentingan agen dengan kepentingan mereka sendiri sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, misalnya dengan pemberian bonus berdasarkan kinerja atau pengawasan yang ketat terhadap tindakan agen (Panda & Leepsa, 2017).

Konflik utama dalam teori *agency* meliputi konflik kepentingan, biaya *agency* dan asimetri informasi. Konflik kepentingan muncul ketika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang berbeda dan preferensi risiko yang tidak sama. Biaya *agency* merupakan biaya yang timbul dari upaya prinsipal untuk memantau dan mengendalikan tindakan agen serta pemberian insentif agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Asimetri informasi terjadi

ketika agen menyembunyikan informasi penting atau bertindak dengan cara yang tidak transparan (Lopes, 2016).

Teori *agency* sering diterapkan dalam berbagai konteks, seperti tata kelola perusahaan, politik, dan sektor publik. Hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen) menjadi fokus utama dalam tata kelola perusahaan, di mana pemegang saham memberikan insentif kepada manajemen untuk memastikan mereka bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pada sektor publik pemerintah (prinsipal) mengawasi dan memberikan insentif kepada lembaga publik (agen) untuk melaksanakan kebijakan yang diinginkan sedangkan dalam politik pemilih (prinsipal) memilih politisi (agen) untuk mewakili kepentingan mereka (Urbanek, 2018).

Penerapan teori ini dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi perilaku oportunistik dan memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Penerapan ini juga dapat meningkatkan biaya pemantauan dan pengendalian serta memiliki potensi untuk menghilangkan sebagian perilaku oportunistik. Prinsipal harus menyeimbangkan biaya dan manfaat dari mekanisme pemantauan dan insentif dalam teori *agency* (Arnold et al., 2017).

Teori *agency* memiliki kelebihan dalam menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan mengelola konflik kepentingan dalam berbagai hubungan organisasi. Kelemahan utamanya adalah biaya yang tinggi untuk pemantauan dan insentif serta potensi perilaku oportunistik yang tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. Teori ini sering dibandingkan dengan teori

stewardship dan teori agensi perilaku, yang menawarkan perspektif alternatif mengenai hubungan prinsipal-agen dengan asumsi yang berbeda tentang motivasi dan perilaku agen (Payne & Petrenko, 2019).

Keberlanjutan perusahaan sangat dipengaruhi oleh penerapan teori *agency* yang efektif. Pemastian agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal perusahaan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan perilaku oportunistik dan meningkatkan efisiensi operasional. Penerapan mekanisme pemantauan dan insentif yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya dan memastikan keberlanjutan bisnis. Biaya pemantauan dan insentif harus dikelola dengan hati-hati agar tidak melebihi manfaat yang diperoleh dari penerapan teori *agency*. Perusahaan perlu terus mengembangkan dan menyesuaikan mekanisme pengendalian dan insentif mereka untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang berubah dalam lingkungan bisnis (Arnold et al., 2017).

Secara keseluruhan, teori *agency* memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami dan mengelola hubungan antara prinsipal dan agen, dengan fokus pada pengurangan konflik kepentingan dan biaya *agency* melalui pemantauan dan sistem insentif. Teori ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi, termasuk tata kelola perusahaan, politik, dan sektor publik, untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada penerapan teori ini secara efektif, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat dari mekanisme pemantauan dan insentif yang diterapkan.

2. Definisi dan Teori-Teori Pendukung

a. Laporan Keberlanjutan

1) Definisi Keberlanjutan

Keberlanjutan pada perusahaan adalah pendekatan strategis yang diambil untuk memastikan operasi bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Laporan keberlanjutan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan sehari-hari mereka. Menurut *Global Reporting Initiative (GRI)*, laporan keberlanjutan menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola serta menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmen terhadap ekonomi global yang berkelanjutan. Laporan ini membantu organisasi untuk mengukur, memahami dan mengomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola mereka serta menetapkan tujuan dan mengelola perubahan secara lebih efektif (*Global Reporting Initiative, 2013*).

Sustainability report merupakan alat penting bagi perusahaan untuk mengelola dan mengukur dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi mereka. Menurut Epstein (2018), laporan keberlanjutan menyediakan pandangan komprehensif tentang kinerja organisasi dalam mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosialnya, sehingga mendukung transparansi dan

akuntabilitas. Dengan laporan ini, perusahaan dapat menilai dampak dari operasional mereka secara keseluruhan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk perbaikan dan inovasi di masa depan.

Selain itu, sustainability report membantu perusahaan dalam menyelaraskan tujuan keberlanjutan dengan strategi bisnis mereka. Alshehhi et al. (2018) menjelaskan bahwa pelaporan keberlanjutan memungkinkan organisasi untuk memastikan pendekatan holistik dalam mengelola dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan kata lain, laporan ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan strategi bisnis perusahaan dengan tujuan keberlanjutan, sehingga memastikan setiap langkah bisnis yang diambil memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan.

Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Rosati dan Faria (2019) menekankan pentingnya pelaporan keberlanjutan. Mengintegrasikan SDGs dalam laporan keberlanjutan menunjukkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan dan mendorong akuntabilitas serta transparansi yang lebih besar. Pelaporan yang mencakup SDGs tidak hanya meningkatkan kredibilitas perusahaan tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap tujuan global yang lebih luas.

Lebih lanjut, praktik pelaporan keberlanjutan memiliki kaitan positif dengan kinerja keuangan, khususnya dalam industri keuangan. Buallay (2019) menemukan bahwa bank yang menerapkan pelaporan keberlanjutan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan

bahwa investasi dalam keberlanjutan dapat menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan.

Dampak regulasi pelaporan sustainability report (SR) dan keberlanjutan terhadap perusahaan juga penting untuk diperhatikan. Christensen et al. (2021) menunjukkan bahwa regulasi wajib pelaporan SR meningkatkan transparansi dan dapat mengarah pada praktik manajemen yang lebih baik. Regulasi ini memastikan bahwa perusahaan melaporkan dampaknya dengan jujur dan mendorong peningkatan dalam praktik manajemen internal.

Transparansi dalam pelaporan keberlanjutan juga menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Nguyen (2020) menyatakan bahwa penerapan pelaporan yang transparan memungkinkan perusahaan untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Hal ini pada gilirannya dapat memperkuat reputasi dan kinerja jangka panjang perusahaan.

2) Manfaat dan Prinsip Laporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan tidak hanya sekedar melaporkan kinerja operasional *ESG (The Environmental, Social and Governance)* namun juga merupakan alat penilaian strategis dan *platform* komunikasi dengan *investor* dan berbagai pemangku kepentingan. Laporan Keberlanjutan juga berfungsi sebagai pemeriksaan “kesehatan” tahunan terhadap kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan untuk peningkatan keberlanjutan dalam memberikan hasil yang bermanfaat bagi bisnis dan pemangku kepentingan perusahaan tersebut.

Di Indonesia, laporan keberlanjutan telah diwajibkan bagi lembaga keuangan dan perusahaan terbuka sejak tahun 2019, namun karena adanya *COVID-19* pada tahun 2020 hingga 2021 tidak berjalan maksimal. Pada tahun 2022 telah tercapai penerapannya sebesar 88% perusahaan tercatat di Indonesia.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, manfaat *sustainability report* meliputi:

- a) Menyediakan informasi pada *stakeholder* (anggota komunitas, pemegang saham dan pemerintah) serta membantu mewujudkan transparansi dan meningkatkan prospek perusahaan.
- b) Membantu membangun reputasi atau sebagai alat yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan *brand value*, loyalitas jangka panjang dan *market share*.
- c) Sebagai cerminan bagaimana perusahaan dalam mengelola risikonya.
- d) Digunakan untuk stimulasi *leadership thinking* serta *performance* yang didukung semangat kompetisi.
- e) Memfasilitasi, mengembangkan, pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial.
- f) Mencerminkan secara langsung kesiapan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan pemegang saham dalam jangka panjang.
- g) Membantu dalam membangun ketertarikan *stakeholder* dengan visi jangka panjang serta membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan terkait dengan isu lingkungan maupun

isu sosial (*World Business Council for Sustainable Development*, 2013).

Prinsip-prinsip menurut *Global Reporting Initiative (GRI) G4 Guidelines* sebagai berikut:

- a) Keseimbangan: Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk memungkinkan penilaian yang beralasan atas kinerja perusahaan secara keseluruhan.
- b) Komparabilitas: Informasi yang dilaporkan harus disajikan secara konsisten sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.
- c) Akurasi: Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci untuk memungkinkan penilaian yang tepat oleh pemangku kepentingan.
- d) Ketepatan Waktu: Laporan harus disusun dan diterbitkan secara teratur agar informasi yang disajikan tetap relevan.
- e) Kejelasan: Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan.
- f) Keandalan: Informasi harus dapat diverifikasi untuk memastikan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan (*Global Reporting Initiative*, 2013).

3) Implementasi dan Tantangan Laporan Keberlanjutan

Implementasi pelaporan keberlanjutan melibatkan tiga elemen utama: dampak ekonomi, dampak lingkungan dan dampak sosial. Dampak ekonomi mencakup penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap *PDB* sedangkan dampak lingkungan meliputi emisi karbon, penggunaan air dan pengelolaan limbah. Dampak sosial berfokus pada hak-hak pekerja, kondisi kerja dan kontribusi terhadap komunitas. Tujuan utama dari pelaporan keberlanjutan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Horváth, 2017).

Tantangan utama dalam implementasi pelaporan keberlanjutan meliputi kurangnya standar pelaporan yang seragam, yang menyulitkan perbandingan antar perusahaan serta potensi bias di mana perusahaan mungkin menghindari pengungkapan informasi negatif (Jose, 2017).

4) Standar dan Pedoman Pelaporan Laporan Keberlanjutan

Standar *Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan salah satu standar yang paling banyak diadopsi di seluruh dunia, menetapkan pedoman untuk pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial. *Integrated Reporting (IR)* menggabungkan pelaporan keberlanjutan dengan pelaporan keuangan, menyediakan pandangan yang lebih holistik tentang kinerja perusahaan. Di Eropa, *EU Non-Financial Reporting Directive (NFRD)* mewajibkan

perusahaan besar untuk mengungkapkan informasi non-keuangan terkait keberlanjutan mulai tahun 2024. *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* mengembangkan standar pelaporan yang berfokus pada informasi material yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Pelaporan keberlanjutan seringkali disejajarkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) PBB, yang menetapkan kerangka kerja untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (Kowal & Kustra, 2016).

Contoh penerapan pelaporan keberlanjutan dapat dilihat pada sektor perusahaan konsumen primer seperti perusahaan makanan besar yang menggunakan standar *Global Reporting Initiative (GRI)* untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, misalnya sebuah perusahaan makanan melaporkan upaya mereka dalam mengurangi jejak karbon melalui penggunaan energi terbarukan, inisiatif pengurangan limbah pangan dan program keberlanjutan yang mendukung pertanian berkelanjutan. Perusahaan ini juga melaporkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung komunitas lokal melalui berbagai program sosial (Kowal & Kustra, 2016).

5) *Global Reporting Initiative (GRI)*

a) Perkembangan Standar *GRI*

Global Reporting Initiative (GRI) telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000. Setiap versi dari standar ini mencerminkan perubahan dalam praktik keberlanjutan serta

tuntutan dan ekspektasi global. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perkembangan standar GRI, termasuk tanggal berlakunya, status kedaluwarsa atau penggantian, dan hubungan antara GRI Standards 2016 dan 2021.

(1) *GRI Guidelines* Generasi Pertama (G1) – 2000

GRI Guidelines Generasi Pertama (G1) diluncurkan pada tahun 2000 sebagai panduan awal untuk pelaporan keberlanjutan, dengan fokus utama pada dampak lingkungan. Standar ini menjadi dasar bagi pelaporan keberlanjutan di seluruh dunia.

Tanggal Berlakunya: 2000.

Status: G1 tidak lagi digunakan secara resmi setelah *GRI Guidelines* Generasi Kedua (G2) diluncurkan pada tahun 2002.

(2) *GRI Guidelines* Generasi Kedua (G2) – 2002

GRI Guidelines Generasi Kedua (G2) diluncurkan pada tahun 2002 dengan cakupan yang diperluas, mencakup dampak sosial dan ekonomi selain dampak lingkungan. Standar ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan.

Tanggal Berlakunya: 2002.

Status: G2 tidak lagi digunakan setelah peluncuran *GRI Guidelines* Generasi Ketiga (G3) pada tahun 2006.

(3) *GRI Guidelines* Generasi Ketiga (G3) – 2006

GRI Guidelines Generasi Ketiga (G3) diperkenalkan pada tahun 2006, dengan penekanan pada pendekatan materialitas yang lebih sistematis. G3

mendorong perusahaan untuk fokus melaporkan isu-isu yang paling relevan dan signifikan bagi keberlanjutan mereka.

Tanggal Berlakunya: 2006.

Status: G3 digantikan oleh *GRI Guidelines*

(4) Generasi Keempat (G4) pada tahun 2013.

GRI Guidelines Generasi Keempat (G4) diluncurkan pada tahun 2013 dengan penguatan lebih lanjut terhadap pendekatan materialitas dan fleksibilitas dalam pelaporan. G4 juga memperkenalkan panduan yang lebih mendalam mengenai pengungkapan terkait rantai pasokan perusahaan.

Tanggal Berlakunya: 2013.

Status: G4 tidak lagi digunakan setelah diperkenalkannya *GRI Standards* 2016.

(5) *GRI Standards* – 2016

Tahun 2016, GRI bertransformasi dari format "Guidelines" menjadi "Standards". *GRI Standards* memperkenalkan struktur modular yang memungkinkan pembaruan lebih mudah dan lebih sering, serta lebih fleksibel untuk diterapkan pada berbagai industri.

Tanggal Berlakunya: 2016.

Status : Meskipun *GRI Standards* tidak memiliki tanggal kedaluwarsa yang tetap, mereka diperbarui secara berkala. Revisi signifikan terakhir dilakukan pada tahun 2021.

(6) Revisi *GRI Standards* – 2021

GRI Standards 2021 merupakan revisi dari GRI Standards 2016. Revisi ini memperkuat elemen-elemen penting seperti pengungkapan terkait hak asasi manusia, keberagaman, serta memperkenalkan pendekatan sektoral yang lebih spesifik untuk berbagai industri.

Tanggal Berlakunya: Oktober 2021.

Status: GRI Standards 2021 masih berlaku hingga saat ini, dengan pembaruan lebih lanjut yang terus dilakukan sesuai dengan perkembangan global dalam praktik keberlanjutan dan regulasi internasional.

(7) Hubungan Antara GRI Standards 2016 dan 2021

GRI Standards 2021 bukanlah standar baru, melainkan versi revisi dari *GRI Standards 2016*. Revisi ini memperbarui dan memperkuat elemen-elemen utama dari GRI 2016, seperti pengungkapan hak asasi manusia, keberagaman, dan pendekatan sektoral. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga relevansi dan efektivitas standar dalam memenuhi tuntutan keberlanjutan yang terus berkembang di tingkat global. Struktur modular yang diperkenalkan pada tahun 2016 memungkinkan *GRI Standards* untuk diperbarui secara berkala, memastikan bahwa standar tersebut tetap sesuai dengan praktik terbaik dalam pelaporan keberlanjutan.

Perkembangan standar GRI dari G1 hingga revisi *GRI Standards 2021* mencerminkan evolusi dalam praktik pelaporan keberlanjutan. GRI telah beradaptasi untuk memenuhi tuntutan global yang terus berubah, dengan berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan relevansi pelaporan keberlanjutan. *GRI Standards 2021* saat ini masih berlaku, dan pembaruan

berkala akan terus dilakukan untuk memastikan standar ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di masa depan.

b) Penggunaan *GRI Standards 2021*

Penggunaan standar *GRI 2021* untuk menilai laporan keberlanjutan dari tahun 2019 merupakan langkah yang dapat dibenarkan berdasarkan berbagai teori dan penelitian terbaru. Teori relevansi temporal, akuntabilitas, serta fleksibilitas pelaporan mendukung gagasan bahwa standar pelaporan yang lebih baru dapat diterapkan untuk menilai laporan dari periode sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi dalam konteks praktik keberlanjutan yang terus berkembang.

(1) Teori Relevansi Temporal

Teori relevansi temporal menunjukkan bahwa evaluasi kinerja keberlanjutan tidak hanya terbatas pada periode yang spesifik, tetapi juga harus mencerminkan dampak jangka panjang perusahaan. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, penggunaan standar terbaru, seperti *GRI 2021*, tetap relevan meskipun laporan yang dinilai berasal dari tahun 2019. Lueddeckens et al. (2020) menyatakan bahwa memasukkan dimensi temporal dalam pelaporan keberlanjutan dapat memastikan bahwa laporan tersebut tetap relevan untuk menilai kesiapan perusahaan menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, meskipun laporan keberlanjutan disusun pada periode sebelumnya, penggunaan standar terbaru memberikan evaluasi yang lebih komprehensif dan up-to-date.

(2) Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas menekankan pentingnya perusahaan bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Akuntabilitas ini tidak bersifat statis, tetapi harus terus diperbarui agar sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan yang berkembang. Adams (2020) menjelaskan bahwa standar pelaporan seperti GRI berevolusi untuk mencerminkan ekspektasi yang berubah tersebut. Penggunaan standar GRI 2021 untuk menilai laporan dari tahun 2019 dapat membantu memastikan bahwa perusahaan tetap memenuhi standar akuntabilitas terkini, yang terus berkembang seiring perubahan regulasi dan harapan masyarakat. Perkiss et al. (2021) juga menekankan bahwa transparansi dalam pelaporan keberlanjutan adalah komponen penting dari akuntabilitas, dan penggunaan standar yang lebih baru dapat mendukung hal ini.

(3) Perkembangan Standar Pelaporan Keberlanjutan

Standar pelaporan keberlanjutan terus mengalami perkembangan untuk mencerminkan harapan masyarakat dan perubahan regulasi yang berlaku. Meutia et al. (2021) menyoroti pentingnya pembaruan dalam standar pelaporan, seperti GRI, untuk memastikan bahwa standar tersebut tetap relevan dengan praktik terbaik saat ini. Dengan menggunakan standar terbaru, perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan, meskipun laporan tersebut berasal dari periode sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keberlanjutan

mencerminkan tantangan keberlanjutan yang terus berkembang dan kebutuhan pemangku kepentingan yang dinamis.

(4) Menghadapi Tantangan Keberlanjutan Masa Depan

Pelaporan keberlanjutan tidak hanya mencerminkan kinerja masa lalu, tetapi juga kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di masa depan. Tregidga dan Laine (2022) menekankan pentingnya perusahaan mempertimbangkan tantangan jangka panjang dalam pelaporan keberlanjutan, seperti perubahan iklim dan isu sosial lainnya. Standar seperti GRI 2021 dirancang untuk membantu perusahaan menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, menggunakan GRI 2021 untuk menilai laporan dari tahun 2019 memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan strategis terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan masa depan.

(5) Penyesuaian terhadap Regulasi dan Praktik Global

Perkembangan regulasi global terkait keberlanjutan mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan praktik pelaporan mereka dengan standar yang lebih baru. KPMG (2020) menyatakan bahwa banyak perusahaan global mulai mengadopsi standar pelaporan terbaru, termasuk GRI 2021, untuk memenuhi tuntutan regulasi dan ekspektasi pasar yang semakin tinggi. Penyesuaian terhadap standar terbaru ini membantu perusahaan meningkatkan posisi mereka dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan yang terus berubah, bahkan jika laporan yang dinilai berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya

fleksibilitas dalam pelaporan keberlanjutan, di mana penggunaan standar terbaru dapat memberikan penilaian yang lebih akurat dan relevan terhadap kinerja perusahaan.

(6) Fleksibilitas dalam Pelaporan Keberlanjutan

Fleksibilitas dalam pelaporan keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa laporan tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam praktik keberlanjutan global. Harvard Business Review (2018) menekankan bahwa fleksibilitas dalam pelaporan keberlanjutan memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan laporan mereka dengan tantangan keberlanjutan yang terus berubah, memastikan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan praktik terbaik yang terus berkembang. Penggunaan standar GRI 2021 untuk menilai laporan dari tahun 2019 dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memastikan bahwa laporan tersebut tetap relevan dan akurat dalam konteks tren global.

(7) Studi Kasus di Negara Berkembang dan Sektor Publik

Penggunaan standar GRI 2021 juga relevan dalam konteks negara berkembang dan sektor publik. Khan et al. (2023) menunjukkan bahwa standar GRI dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam konteks negara berkembang seperti Pakistan, di mana infrastruktur pelaporan keberlanjutan mungkin masih kurang berkembang. Roberto et al. (2020) juga menyoroti pentingnya penggunaan standar GRI di sektor publik Italia untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam

pelaporan keberlanjutan. Penggunaan standar terbaru ini memungkinkan evaluasi yang lebih konsisten dan relevan dalam berbagai konteks.

(8) Kerangka Pelaporan Keberlanjutan

Abeysekera (2022) mengembangkan kerangka pelaporan keberlanjutan berdasarkan teori keadilan distributif. Penelitian ini menekankan pentingnya menggunakan standar pelaporan keberlanjutan yang terus diperbarui, seperti GRI 2021, untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Penggunaan standar terbaru ini memastikan bahwa laporan keberlanjutan mencerminkan praktik terbaik yang relevan, bahkan jika laporan tersebut berasal dari periode sebelumnya.

Berdasarkan teori relevansi temporal, akuntabilitas, dan fleksibilitas pelaporan keberlanjutan, penggunaan standar GRI 2021 untuk menilai laporan dari tahun 2019 dapat dibenarkan. Standar terbaru mencerminkan praktik terbaik, regulasi terbaru, dan ekspektasi pasar yang terus berkembang, sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan, transparan, dan akuntabel di tengah perubahan lingkungan keberlanjutan global. Penelitian terbaru juga mendukung penggunaan GRI 2021 dalam berbagai konteks, termasuk negara berkembang dan sektor publik, yang menunjukkan pentingnya standar terbaru ini untuk meningkatkan transparansi dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan di masa depan.

c) *GRI Standards 2021*

Berikut adalah pembahasan singkat mengenai indikator pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan *GRI Standards 2021*:

a) *GRI 2: Pengungkapan Umum*

Menguraikan detail organisasi, entitas dalam pelaporan, periode dan frekuensi laporan, serta penjaminan eksternal. Mencakup aktivitas rantai nilai, tenaga kerja, dan pekerja tidak langsung. Menjelaskan struktur tata kelola, peran dalam manajemen dampak, kebijakan remunerasi, dan evaluasi kinerja. Memuat strategi keberlanjutan, komitmen kebijakan, dan mekanisme memperbaiki dampak negatif.

b) *GRI 3: Topik Material*

Menjelaskan proses penentuan topik material, daftar topik material yang diidentifikasi, dan manajemen topik tersebut untuk memastikan fokus pada isu-isu keberlanjutan relevan.

c) *GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016*

Meliputi nilai ekonomi yang dihasilkan, risiko dan peluang dari perubahan iklim, kewajiban program pensiun, dan bantuan finansial dari pemerintah.

d) *GRI 202: Keberadaan Pasar 2016*

Mencakup rasio upah karyawan pemula terhadap upah minimum dan proporsi manajemen senior dari masyarakat setempat.

e) *GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016*

Menguraikan investasi infrastruktur, dukungan layanan, dan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.

f) *GRI 204: Praktik Pengadaan 2016*

Menyajikan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal.

g) *GRI 205: Antikorupsi 2016*

Menguraikan operasi berisiko korupsi, pelatihan kebijakan antikorupsi, dan insiden korupsi serta tindakan yang diambil.

h) *GRI 206: Perilaku Antipersaingan 2016*

Menjelaskan langkah-langkah hukum terhadap perilaku antipersaingan dan monopoli.

i) *GRI 207: Pajak 2019*

Menguraikan pendekatan pajak, tata kelola risiko pajak, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pajak, dan laporan per negara.

j) *GRI 301: Material 2016*

Menyajikan data material yang digunakan, material daur ulang, dan produk pemerolehan ulang.

k) *GRI 302: Energi 2016*

Menguraikan konsumsi energi, intensitas energi, dan upaya pengurangan konsumsi energi.

l) *GRI 303: Air dan Efluen 2018*

Mencakup interaksi dengan sumber daya air, manajemen pembuangan air, pengambilan air, dan konsumsi air.

m) *GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016*

Menguraikan lokasi operasi dekat kawasan lindung, dampak signifikan pada keanekaragaman hayati, dan spesies terancam yang terkena dampak.

n) *GRI 305: Emisi 2016*

Menyajikan data emisi GRK langsung dan tidak langsung, intensitas emisi, dan upaya pengurangan emisi.

o) *GRI 306: Limbah 2020*

Menguraikan timbulan limbah, manajemen dampak limbah, dan pengalihan serta pembuangan akhir limbah.

p) *GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016*

Menjelaskan seleksi pemasok dengan kriteria lingkungan dan dampak negatif dalam rantai pasokan.

q) *GRI 401: Kepegawaian 2016*

Mencakup perekrutan dan pergantian karyawan, tunjangan karyawan purnawaktu, dan cuti melahirkan.

r) *GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016*

Menguraikan periode pemberitahuan minimum terkait perubahan.

s) *GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018*

Menjelaskan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan, partisipasi pekerja, dan data kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja.

t) *GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016*

Mencakup rata-rata jam pelatihan per karyawan, program pengembangan keterampilan, dan tinjauan kinerja rutin.

u) *GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016*

Menguraikan keanekaragaman tata kelola dan karyawan, serta rasio gaji perempuan dibandingkan laki-laki.

v) *GRI 406: Nondiskriminasi 2016*

Mencakup insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan.

w) *GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016*

Menjelaskan operasi dan pemasok yang berisiko terkait hak kebebasan berserikat dan perundingan kolektif.

x) *GRI 408: Pekerja Anak 2016*

Menguraikan operasi dan pemasok yang berisiko terhadap pekerja anak.

y) *GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016*

Menjelaskan operasi dan pemasok yang berisiko terkait kerja paksa atau wajib kerja.

z) *GRI 410: Praktik Keamanan 2016*

Menguraikan pelatihan petugas keamanan mengenai hak asasi manusia.

aa) *GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016*

Menjelaskan insiden pelanggaran hak masyarakat adat.

bb) *GRI 413: Masyarakat Setempat 2016*

Menguraikan operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan.

cc) *GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016*

Menyajikan seleksi pemasok dengan kriteria sosial dan dampak sosial negatif dalam rantai pasokan serta tindakan yang diambil.

dd) *GRI 415: Kebijakan Publik 2016*

Menguraikan kontribusi politik yang diberikan oleh organisasi.

ee) *GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 2016*

Menjelaskan penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa serta insiden ketidakpatuhan yang terkait.

ff) *GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016*

Menguraikan persyaratan pelabelan dan informasi produk, serta insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan.

gg) *GRI 418: Privasi Pelanggan 2016*

Menjelaskan pengaduan mengenai pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.

b. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan, kebijakan dan proses yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan, seperti pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya, sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, meningkatkan efisiensi dan memastikan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan. Menurut *OECD* prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kerangka kerja hukum, regulasi dan institusional untuk tata kelola perusahaan yang baik (Aluchna, 2017).

Tata kelola perusahaan menjadi penting terutama setelah krisis keuangan yang menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam operasional

perusahaan. Tata kelola perusahaan telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* sebagai tata cara kelola perusahaan sehat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan serta membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang.

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, tata kelola perusahaan merupakan serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan harapan *stakeholders*. Tata kelola perusahaan merupakan rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta kontinuitas usaha (Winardi, 2020). Komponen utama tata kelola perusahaan mencakup struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya. Struktur ini melibatkan dewan komisaris, komite audit, direksi dan pemegang saham (Hagiu & Bărbulescu, 2016).

1) Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

- (1) **Transparansi:** Transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, hal ini mencakup pelaporan keuangan, kebijakan

perusahaan dan keputusan strategis yang signifikan. Transparansi membantu membangun kepercayaan dan mencegah konflik kepentingan.

- (2) Akuntabilitas: Akuntabilitas menekankan kewajiban manajemen untuk menjelaskan tindakan mereka dan hasilnya kepada pemangku kepentingan, hal ini mencakup tanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi perusahaan.
- (3) Tanggung Jawab: Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta komitmen terhadap tanggung jawab pelaporan keberlanjutan.
- (4) Kemandirian: Kemandirian memastikan bahwa dewan direksi dan komite perusahaan dapat membuat keputusan tanpa pengaruh dari pihak-pihak tertentu yang mungkin memiliki kepentingan pribadi. Prinsip ini penting untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan.
- (5) Keadilan: Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan. Prinsip ini penting untuk menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa hak-hak semua pemangku kepentingan dihormati.

2) Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- a) Meningkatkan Kepercayaan Investor: Tata kelola perusahaan yang baik membantu membangun kepercayaan investor baik domestik maupun

internasional dengan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan transparan dan akuntabel.

- b) Melindungi Hak Pemegang Saham: Tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang saham termasuk hak untuk memperoleh informasi yang relevan dan tepat waktu serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting perusahaan.
 - c) Meningkatkan Kinerja dan Nilai Perusahaan: Adanya praktik tata kelola yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko lebih efektif, memanfaatkan peluang bisnis dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
 - d) Memastikan Kepatuhan Hukum: Tata kelola perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk beroperasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, mengurangi risiko hukum dan meningkatkan reputasi perusahaan.
 - e) Mendukung Keberlanjutan Jangka Panjang: Tata kelola perusahaan yang baik membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui pendekatan yang berfokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 3) Pendekatan dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- a) Pendekatan Struktur: Berfokus pada pembentukan dewan direksi, komite-komite pendukung seperti komite audit dan pengaturan struktur

kepemilikan. Struktur ini dirancang untuk memastikan keseimbangan kekuatan dan pengawasan yang memadai terhadap manajemen.

- b) Pendekatan Proses: Melibatkan penetapan prosedur dan kebijakan yang mengatur bagaimana keputusan dibuat dan dilaksanakan dalam perusahaan, hal ini termasuk proses pelaporan, audit internal dan pengawasan keuangan yang ketat.
- c) Pendekatan Prinsip: Mengedepankan nilai-nilai inti seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan keadilan dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar etika dan hukum yang tinggi.

4) Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

a) Mekanisme Internal

- (1) Dewan Direksi dan Struktur Kepemilikan: Dewan direksi berperan sebagai pengawas utama yang memastikan perusahaan dikelola dengan baik. Struktur kepemilikan yang jelas membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham.
- (2) Komite Audit dan Remunerasi: Komite ini bertugas memastikan laporan keuangan yang akurat dan kompensasi eksekutif yang adil, hal ini membantu memitigasi risiko manipulasi informasi keuangan dan insentif yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham.
- (3) Pengendalian Internal dan Audit Internal: Sistem ini memastikan adanya kontrol yang memadai atas operasi perusahaan, membantu mendeteksi

dan mencegah kecurangan serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan.

b) Mekanisme Eksternal

- (1) Pasar untuk Pengendalian Korporasi: Mekanisme ini mencakup pengambil alihan dan *merger*, yang berfungsi untuk menggantikan manajemen yang tidak efektif dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, hal ini juga mencakup reaksi pasar terhadap praktik perusahaan yang buruk, yang dapat mempengaruhi harga saham.
- (2) Regulasi dan Kepatuhan: Pemerintah dan badan regulasi menetapkan aturan yang harus diikuti oleh perusahaan termasuk persyaratan pelaporan dan transparansi yang ketat, hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam batasan hukum dan etika.
- (3) Peran Pemegang Saham dan *Investor* Institusional: Pemegang saham dapat memengaruhi perusahaan melalui hak suara mereka termasuk dalam pemilihan anggota dewan dan kebijakan lainnya. *Investor* institusional sering memiliki pengaruh besar dalam mendesak perusahaan untuk menerapkan praktik *GCG* yang baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik memiliki dampak signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik membantu memperkuat struktur dan proses tata kelola, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan kualitas laporan

keberlanjutan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan komite tata kelola yang efektif berkontribusi pada pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan mendalam, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat lebih mampu memenuhi kebutuhan informasi berbagai pemangku kepentingan terkait isu keberlanjutan (Triwacananingrum et al., 2021).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih komprehensif cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik khususnya dalam dimensi ekonomi. tata kelola perusahaan yang baik membantu dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang muncul dari isu-isu keberlanjutan sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan (Gunarsih et al., 2020).

Secara keseluruhan, tata kelola perusahaan yang baik memberikan fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk mengelola tantangan keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Struktur tata kelola yang efektif memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap tuntutan pemangku kepentingan dan memanfaatkan peluang dalam bidang keberlanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan (Tjahjadi et al., 2021). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif dapat memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik dalam penelitian ini

akan di proksikan menjadi dua proksi yaitu kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen.

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer atau eksekutif perusahaan. Kepemilikan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek operasional dan strategis perusahaan termasuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*), hal ini penting karena dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan mengelola dan melaporkan inisiatif keberlanjutannya. Kepemilikan manajerial muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan, di mana terdapat potensi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat memotivasi manajer untuk bekerja lebih keras dan lebih fokus pada kinerja jangka panjang perusahaan.

Komponen utama dari kepemilikan manajerial melibatkan manajer eksekutif dan saham perusahaan yang mereka miliki. Ini termasuk *CEO*, direktur, dan manajer lainnya yang memiliki saham di perusahaan. Tujuan dari kepemilikan manajerial adalah untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial menciptakan hubungan dimana manajer memiliki insentif finansial langsung untuk meningkatkan kinerja perusahaan, hal ini dapat mempengaruhi keputusan investasi, kebijakan keuangan dan strategi

bisnis lainnya. Potensi konflik dalam kepemilikan manajerial termasuk efek penguatan, dimana manajer dengan kepemilikan besar dapat membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri tetapi merugikan pemegang saham lainnya, selain itu ada risiko bahwa manajer dapat menyembunyikan informasi buruk untuk melindungi nilai saham mereka.

Penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial pada sektor barang konsumen tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan, namun faktor lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Merliana, 2021). Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pendapatan dalam perusahaan manufaktur sektor barang konsumen tetapi kualitas audit dan komite audit memiliki pengaruh signifikan (Sitanggang et al., 2020).

Gao dan Song (2021) menemukan bahwa kepemilikan manajerial di Tiongkok digunakan sebagai mekanisme insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan, menunjukkan bahwa manajemen yang memiliki saham lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Junias et al. (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki efek positif dan signifikan terhadap akuntansi keberlanjutan. Manajer yang memiliki saham cenderung menggunakan arus kas bebas tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk tujuan keberlanjutan sosial dan lingkungan sebagai keputusan strategis perusahaan.

Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi masalah keagenan dan memotivasi manajemen untuk fokus pada kinerja jangka panjang (Berke-Berga et al., 2017). Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan pengawasan internal dan eksternal yang berdampak positif pada pengambilan keputusan dan efisiensi operasional perusahaan, selain itu kepemilikan oleh manajer dapat memberikan sinyal positif kepada *investor* dan pasar tentang komitmen manajemen terhadap keberhasilan perusahaan. Kepemilikan ini juga mendorong inovasi dan pengambilan risiko yang terkontrol karena manajemen memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan jangka panjang perusahaan (Rhou et al., 2019). Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan penggunaan arus kas bebas untuk investasi yang produktif, yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan (Suharto et al., 2019).

Kepemilikan manajerial sejalan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham untuk mengurangi biaya keagenan. Teori ini juga berkaitan dengan teori sinyal, di mana kepemilikan saham oleh manajemen dapat memberikan sinyal positif kepada pasar tentang kepercayaan manajemen terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Vijayakumaran (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan insentif manajemen dengan kepentingan pemegang saham dan mengurangi kendala likuiditas yang dihadapi perusahaan, bertindak sebagai jaminan kredibel bagi pemberi pinjaman.

Secara keseluruhan, kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham serta meningkatkan kinerja perusahaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat memainkan peran penting dalam mendukung praktik keberlanjutan dalam perusahaan.

d. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan sekumpulan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan materi atau afiliasi dengan perusahaan, pemegang saham utama atau manajemen yang dapat memengaruhi independensinya. Mereka bertindak sebagai pihak eksternal yang memberikan pengawasan objektif terhadap operasional dan keputusan manajemen perusahaan (Tambunan & Rosharlianti, 2023). Keberadaan mereka sangat penting mengingat sejarah skandal keuangan besar seperti Enron dan WorldCom, yang memicu kebutuhan akan pengawasan lebih ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan publik (Arieftiara et al., 2021).

Tanggung jawab utama komisaris independen meliputi pengawasan keuangan, memastikan transparansi laporan keuangan dan mengawasi proses audit internal serta eksternal. Mereka juga bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku serta mengawasi implementasi praktik etika dan tata kelola perusahaan yang baik. Mereka juga berperan dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan mengembangkan strategi mitigasi risiko serta mengawasi keputusan strategis

untuk memastikan keselarasan dengan tujuan jangka panjang perusahaan (Hendrawaty et al., 2021).

Dewan komisaris independen juga memiliki tanggung jawab dalam evaluasi kinerja dewan dan manajemen secara berkala serta memastikan adanya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Mereka mengawasi kebijakan remunerasi untuk memastikan insentif yang diberikan sejalan dengan kinerja perusahaan dan kepentingan pemegang saham. Dalam hal komunikasi dengan pemangku kepentingan, mereka harus memastikan transparansi informasi dan menanggapi umpan balik dari pemegang saham untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan. Pengelolaan konflik kepentingan juga menjadi tanggung jawab mereka dengan proaktif mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik kepentingan serta menyatakan setiap konflik yang teridentifikasi dalam rapat dewan untuk transparansi (Yoewono, 2023).

1) Syarat Komisaris Independen:

a) Kemandirian Finansial dan Hubungan:

Tidak memiliki hubungan finansial yang signifikan dengan perusahaan atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kemandirian mereka, hal ini termasuk tidak menjadi bagian dari manajemen perusahaan atau tidak memiliki kontrak yang berarti dengan perusahaan.

b) Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pihak Manajemen:

Komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan direksi atau eksekutif lainnya agar terhindar dari potensi konflik kepentingan yang berasal dari hubungan personal.

c) Tidak Memiliki Kepemilikan Saham yang Signifikan:

Untuk menjaga objektivitas, komisaris independen biasanya tidak diperbolehkan memiliki kepemilikan saham yang signifikan dalam perusahaan. Batas kepemilikan saham ini bervariasi tergantung pada regulasi yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.

d) Tidak Memegang Posisi Eksekutif atau Konsultan:

Komisaris independen tidak boleh memegang posisi eksekutif atau menjadi konsultan di perusahaan tersebut atau di perusahaan afiliasi, karena hal ini dapat mengurangi kemandirian mereka dalam pengawasan.

e) Pengalaman dan Kompetensi:

Selain kemandirian, komisaris independen juga harus memiliki pengalaman dan kompetensi yang relevan. Mereka diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang industri dan kemampuan untuk menilai kebijakan perusahaan dengan kritis.

f) Masa Jabatan yang Terbatas:

Untuk mencegah kedekatan yang berlebihan dengan perusahaan yang dapat mengurangi objektivitas, beberapa aturan mewajibkan komisaris independen memiliki masa jabatan yang terbatas.

Banyak negara memiliki regulasi yang menetapkan jumlah minimum komisaris independen dalam dewan komisaris terutama untuk perusahaan publik seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaan terdaftar

untuk memiliki komisaris independen yang jumlahnya minimal 30% dari total anggota dewan komisaris.

Penelitian tentang peran komisaris independen dalam laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi laporan tersebut. Almeida dan Paiva (2022) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen dalam komite audit berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan *ESG (Environmental, Social, and Governance)*. Mereka memastikan bahwa informasi yang disampaikan lebih komprehensif dan relevan, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan dan pasar modal. Studi di Jerman oleh Nguyen (2020) juga menunjukkan bahwa dewan direksi yang lebih independen cenderung mematuhi panduan *Global Reporting Initiative (GRI)* dengan lebih baik, menunjukkan bahwa transparansi perusahaan dalam laporan keberlanjutan dapat ditingkatkan dengan adanya komisaris independen.

Penelitian di Amerika Serikat oleh Herda et al. (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan lebih banyak komisaris independen cenderung menerbitkan laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri dan berkualitas lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keberlanjutan mereka. Selanjutnya, Ong dan Djajadikerta (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen memastikan bahwa perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih luas dan mendalam yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan

lingkungan, hal ini meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan.

e. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merujuk pada ukuran seberapa baik suatu perusahaan dapat menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. Teori kinerja keuangan berfokus pada berbagai faktor dan mekanisme yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya (Boukhobza & Chami, 2023). Kinerja keuangan mencakup berbagai aspek seperti efisiensi penggunaan aset, pengelolaan biaya dan pencapaian tujuan keuangan yang ditetapkan. Secara umum, kinerja keuangan mencerminkan hasil atau pencapaian yang diperoleh oleh manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Pengukuran kinerja keuangan biasanya dilakukan melalui analisis laporan keuangan perusahaan yang mencakup berbagai rasio keuangan seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Debt to Equity Ratio* dan lain-lain. Rasio-rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas perusahaan (Hada, 2020).

- 1) Arti Penting Kinerja Keuangan
 - a) Kinerja keuangan memiliki arti penting yang signifikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan termasuk manajemen, pemegang saham, kreditor dan *investor*
 - b) Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan: Kinerja keuangan memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan, membantu manajemen mengevaluasi kondisi keuangan dan menentukan perlu tidaknya perbaikan.
 - c) Pengambilan Keputusan: Informasi tentang kinerja keuangan digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan strategis terkait operasional, investasi dan pembiayaan, membantu mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.
 - d) Transparansi dan Akuntabilitas: Kinerja keuangan yang baik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, memungkinkan pemegang saham dan *investor* untuk menilai kinerja dan membuat keputusan investasi yang tepat.
 - e) Meningkatkan Nilai Pemegang Saham: Kinerja keuangan yang positif berdampak langsung pada peningkatan nilai saham perusahaan, memberikan keuntungan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan apresiasi nilai saham.
 - f) Pengelolaan Risiko: Dengan memantau kinerja keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko keuangan seperti likuiditas, kredit dan operasional.

g) Menarik *Investor* dan Kreditor: Kinerja keuangan yang baik membuat perusahaan lebih menarik bagi *investor* dan kreditor, meningkatkan peluang mendapatkan investasi dan pinjaman.

2) Komponen utama dari teori kinerja keuangan meliputi:

Dalam dunia bisnis, memahami komponen-komponen keuangan adalah hal yang esensial untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Menurut Gibson (2021), berikut komponen-komponen keuangan

1. Profitabilitas

(1) *Return on Assets (ROA)*: *ROA* mengukur seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. *ROA* adalah indikator penting dalam memahami bagaimana manajemen memaksimalkan penggunaan aset yang tersedia.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

ROA yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Angka ini sangat bervariasi antar industri, oleh karena itu perbandingan dengan perusahaan sejenis lebih relevan.

(2) *Return on Equity (ROE)*: *ROE* mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham, hal ini menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan modal ekuitas.

$$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Shareholder's Equity}} \times 100\%$$

ROE yang lebih tinggi umumnya diinginkan karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba lebih besar dari modal yang diinvestasikan namun rasio yang terlalu tinggi juga bisa menunjukkan risiko tinggi jika didukung oleh tingkat *leverage* yang tinggi.

- (3) *Net Profit Margin (NPM)*: *NPM* mengukur persentase pendapatan yang diubah menjadi laba bersih setelah dikurangi semua biaya termasuk pajak dan bunga, hal ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan.

$$\text{Inventory Turnover} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Average Inventory}} \times 100\%$$

NPM yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi dalam mengelola biaya operasional dan lainnya serta kemampuan perusahaan untuk mempertahankan harga produk atau jasa.

- (4) *Gross Profit Margin (GPM)*: *GPM* menunjukkan persentase pendapatan yang tersisa setelah mengurangi harga pokok penjualan (HPP), yang mencerminkan efisiensi dalam produksi dan penjualan.

$$\text{GPM} = \frac{\text{Pendapatan} - \text{HPP}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

GPM yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian biaya produksi yang baik dan dapat menjual produknya dengan margin yang sehat.

- (5) *Operating Profit Margin (OPM)*: *OPM* mengukur persentase pendapatan yang tetap sebagai laba operasional setelah dikurangi biaya operasi, tetapi sebelum bunga dan pajak.

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio ini penting untuk memahami efisiensi operasi perusahaan termasuk pengendalian biaya *overhead* dan biaya lainnya.

b) Likuiditas

- (1) *Current Ratio*: Mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki, hal ini memberikan pandangan umum tentang likuiditas perusahaan.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilitas}} \times 100\%$$

Rasio ini biasanya diharapkan berada di atas 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya namun rasio yang terlalu tinggi bisa menandakan penggunaan aset lancar yang tidak efisien.

- (2) *Quick Ratio (Acid-Test Ratio)*: Rasio ini lebih konservatif dibandingkan *Current Ratio* karena tidak memperhitungkan persediaan, yang mungkin tidak cepat likuid.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Inventories}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Quick Ratio di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan, yang berguna dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti.

- (3) *Cash Ratio*: Mengukur kas dan setara kas yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek, memberikan pandangan paling likuid tentang likuiditas perusahaan.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Total Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Rasio ini memberikan pandangan tentang keamanan keuangan perusahaan, terutama dalam situasi darurat.

- (4) *Working Capital*: Selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, menunjukkan likuiditas jangka pendek perusahaan.

$$\text{Working Capital} = \text{Total Aset Lancar} - \text{Total Kewajiban lancar}$$

Working capital positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup aset lancar untuk mendanai operasi sehari-hari sedangkan *working capital* negatif menunjukkan potensi masalah likuiditas.

c) *Leverage*

- (1) *Debt to Equity Ratio*: Mengukur proporsi utang terhadap ekuitas dalam struktur modal perusahaan, yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan utang yang lebih besar, yang dapat meningkatkan risiko keuangan tetapi juga memiliki potensi pengembalian. Rasio yang lebih rendah menunjukkan struktur modal yang lebih konservatif.

- (2) *Debt Ratio*: Mengukur proporsi total aset yang didanai oleh utang, memberikan wawasan tentang *leverage* keseluruhan perusahaan.

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Debt Ratio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak didanai oleh utang, yang dapat meningkatkan risiko default jika kondisi ekonomi memburuk.

- (3) *Interest Coverage Ratio*: Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas utangnya dari laba operasi, yang penting untuk menilai kesehatan finansial jangka panjang.

$$\text{Interest Coverage Ratio} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Beban Bunga}} \times 100\%$$

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup laba untuk menutupi beban bunga, yang menunjukkan kesehatan keuangan yang baik.

- (4) *Equity Ratio*: Mengukur persentase aset yang didanai oleh ekuitas pemegang saham, menunjukkan stabilitas modal perusahaan.

$$\text{Equity Ratio} = \frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar pemilik memiliki aset perusahaan dibandingkan dengan kreditor, yang penting untuk memahami stabilitas keuangan perusahaan.

d) Efisiensi Operasional

- (1) *Asset Turnover Ratio*: Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan, yang penting untuk memahami efisiensi operasional.

$$\text{Asset Turnover Ratio} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif untuk menghasilkan pendapatan, yang mencerminkan efisiensi manajemen.

- (2) *Inventory Turnover Ratio*: Mengukur frekuensi perputaran persediaan perusahaan dalam periode tertentu, yang penting untuk manajemen persediaan.

$$\text{Inventory Turnover Ratio} = \frac{\text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Rata-rata Persediaan}} \times 100\%$$

Rasio yang tinggi menunjukkan manajemen persediaan yang efisien tetapi rasio yang terlalu tinggi bisa mengindikasikan risiko kehabisan stok.

- (3) *Receivables Turnover Ratio*: Mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengumpulkan piutang, yang penting untuk manajemen kas.

$$\text{Receivables Turnover Ratio} = \frac{\text{Total Penjualan Kredit}}{\text{Rata-rata Piutang}} \times 100\%$$

Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih cepat mengumpulkan piutang, yang baik untuk arus kas.

- (4) *Days Sales Outstanding (DSO)*: Mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setelah penjualan kredit.

$$DSO = \frac{\text{Rata-rata Piutang}}{\text{Total Penjualan Kredit}} \times \text{Jumlah Hari dalam Periode}$$

DSO yang lebih rendah menunjukkan penagihan piutang yang lebih cepat, yang baik untuk aliran kas.

(5) *Days Inventory Outstanding (DIO)*: Mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual seluruh persediaan.

$$DIO = \frac{\text{Rata-rata Persediaan}}{\text{HPP}} \times \text{Jumlah Hari dalam Periode}$$

DIO yang rendah menunjukkan efisiensi dalam manajemen persediaan tetapi jika terlalu rendah bisa mengindikasikan risiko kekurangan stok.

(6) *Days Payable Outstanding (DPO)*: Mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemasok.

$$DPO = \frac{\text{Rata-rata Hutang Dagang}}{\text{HPP}} \times \text{Jumlah Hari dalam Periode}$$

DPO yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kredit pemasok untuk mengelola arus kas tetapi jika terlalu tinggi dapat merusak hubungan dengan pemasok.

e) Nilai Pasar

(1) *Price to Earnings Ratio (P/E Ratio)*: Mengukur valuasi saham perusahaan relatif terhadap laba per sahamnya, ratio ini digunakan untuk memahami persepsi pasar terhadap pertumbuhan laba di masa depan.

$$PE \text{ Ratio} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Laba Per Saham (EPS)}} \times 100\%$$

P/E Ratio yang tinggi dapat menunjukkan ekspektasi pertumbuhan laba yang tinggi tetapi juga bisa menunjukkan harga saham yang *overvalued*.

(2) *Dividend Yield*: Mengukur tingkat pengembalian dividen yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham relatif terhadap harga saham.

$$Dividend\ Yield = \frac{\text{Dividen Tahunan Per Lembar}}{\text{Harga Saham Per lembar}} \times 100\%$$

Dividend Yield yang tinggi menarik bagi *investor* yang mencari pendapatan reguler dari investasi saham tetapi juga dapat menunjukkan harga saham yang tertekan atau kebijakan dividen yang tidak berkelanjutan.

Tujuan utama dari penerapan teori kinerja keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan, memastikan stabilitas keuangan dan mencapai efisiensi operasional yang maksimal, hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang (Goeminne & George, 2018). Manfaat penerapan teori ini meliputi peningkatan profitabilitas melalui optimalisasi aset dan sumber daya, pengurangan risiko dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan secara efektif, meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan serta peningkatan reputasi melalui praktik *ESG* yang baik (Brahmana & Kontesa, 2021).

Pendekatan dalam teori kinerja keuangan mencakup analisis laporan keuangan, evaluasi risiko dan implementasi praktik tata kelola yang baik (Salamah, 2023). Struktur teori kinerja keuangan terdiri dari berbagai elemen seperti dewan direksi, komite audit, manajemen eksekutif dan pemegang saham

yang bekerja sama untuk mencapai tujuan finansial perusahaan (Elbashir, 2022). Mekanisme kerja teori ini melibatkan proses evaluasi, perencanaan, dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal-hal ini termasuk penggunaan indikator keuangan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional (Fisher et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara kinerja keuangan dan keberlanjutan perusahaan. Keberlanjutan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi dalam jangka panjang dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Penelitian Hada (2020) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi praktik keberlanjutan sering kali juga menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Praktik keberlanjutan ini meliputi pengelolaan sumber daya alam yang efisien, tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga meningkatkan profitabilitas dan efisiensi operasional perusahaan (Hada, 2020). Penelitian lain oleh Brahmana dan Kontesa (2021) menunjukkan bahwa teknologi bersih dapat memperkuat dampak positif keberlanjutan terhadap kinerja keuangan, terutama dalam sektor konsumen primer. Implementasi teknologi bersih membantu mengurangi dampak lingkungan negatif dan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik (Brahmana & Kontesa, 2021).

Kinerja keuangan merupakan indikator penting dari kesehatan dan efisiensi operasional perusahaan. Penerapan teori kinerja keuangan dan mengintegrasikan praktik keberlanjutan perusahaan dapat meningkatkan nilai, efisiensi dan keberlanjutan jangka panjang. Evaluasi kinerja keuangan yang tepat melibatkan penggunaan berbagai indikator keuangan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi finansial perusahaan dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat yang optimal. Penelitian ini akan memproksikan kinerja keuangan menjadi dua proksi, yaitu profitabilitas dan *leverage*.

f. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Profitabilitas mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan serta kesehatan finansial dan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Secara umum, profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam mengelola aset dan kewajibannya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham. Profitabilitas diukur menggunakan *ROA* memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba.

Profitabilitas adalah faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Profitabilitas memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan. Perusahaan yang profitabel dapat membiayai operasi

sehari-hari, membayar dividen dan berinvestasi dalam pertumbuhan masa depan tanpa harus bergantung pada pinjaman eksternal atau pendanaan tambahan. Profitabilitas juga menarik bagi *investor* karena menunjukkan potensi pengembalian investasi yang lebih baik. Perusahaan dengan *ROA* yang tinggi sering dianggap lebih menarik bagi *investor* karena mereka menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset dengan efektif untuk menghasilkan laba (Tehrani, Abadeh, & Abadeh, 2016).

Manajemen menggunakan profitabilitas sebagai alat untuk membuat keputusan strategis. Analisis profitabilitas membantu manajemen dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, mengevaluasi efektivitas strategi operasional, dan menentukan alokasi sumber daya yang optimal (Purwanti, 2019). Perusahaan yang profitabel memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam ekspansi dan inovasi. Profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi peluang pasar baru, mengembangkan produk dan layanan baru serta meningkatkan kapasitas operasional. Profitabilitas juga memberikan stabilitas finansial yang penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Perusahaan yang memiliki cadangan laba yang cukup dapat lebih mudah mengatasi tantangan eksternal seperti resesi ekonomi, perubahan regulasi atau fluktuasi pasar (Haliza et al., 2021). Profitabilitas yang tinggi juga meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham, hal ini dapat tercermin dalam harga saham yang lebih tinggi dan dividen yang lebih besar sehingga meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur laba yang dihasilkan dari total aset perusahaan. *ROA* memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan.

ROA adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Tingkat *ROA* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari total aset yang dimiliki. Tehrani, Abadeh, dan Abadeh (2016) menunjukkan bahwa *ROA* memiliki hubungan signifikan dengan rasio margin laba dan perputaran aset, dan *ROA* lebih dipengaruhi oleh margin laba daripada perputaran aset. *ROA* yang tinggi juga membuat perusahaan lebih menarik bagi *investor*. *Investor* cenderung mencari perusahaan dengan *ROA* tinggi karena ini menunjukkan potensi pengembalian investasi yang lebih baik. *ROA* yang tinggi juga mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham (Purwanti, 2019).

Stabilitas finansial perusahaan juga dapat ditunjukkan melalui *ROA* yang kuat. Perusahaan dapat lebih mudah menghadapi tantangan keuangan dan ekonomi yang tidak terduga dengan menghasilkan laba yang signifikan dari total aset. Stabilitas finansial ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Stabilitas finansial ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti fluktuasi pasar dan perubahan

kebijakan ekonomi. Haliza et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan kualitas aset penghasilan (*Earning Asset Quality*) memiliki pengaruh signifikan terhadap *ROA*, menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset dalam mempertahankan profitabilitas. *ROA* juga digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk membuat keputusan strategis. Rasio ini membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan aset dan menentukan strategi keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. *ROA* juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor di industri yang sama.

ROA juga memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba. Analisis *ROA* membantu manajemen mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan menganalisis *ROA* manajemen dapat menentukan apakah strategi operasional saat ini sudah optimal atau memerlukan penyesuaian. Kebijakan dividen perusahaan juga dapat mempengaruhi *ROA*. Perusahaan yang membagikan dividen tinggi mungkin memiliki *ROA* yang lebih rendah karena sebagian laba dibagikan kepada pemegang saham daripada diinvestasikan kembali dalam bisnis. Sebaliknya, perusahaan yang mempertahankan laba untuk reinvestasi mungkin memiliki *ROA* yang lebih tinggi. Kebijakan ini sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan antara memberikan pengembalian kepada pemegang saham dan memastikan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

g. *Leverage*

Leverage merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang mengacu pada penggunaan utang atau ekuitas untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* mencerminkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitasnya untuk membiayai aset dan operasinya.

Menurut Parashtiw (2023), *leverage* adalah penggunaan aset dan kekuatan perusahaan untuk menanggung biaya jangka pendek dan jangka panjang seperti utang, untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. *Leverage* memanfaatkan aset perusahaan untuk meningkatkan pendanaan dan operasional. Pimplaure (2018) mendefinisikan *leverage* keuangan sebagai investasi dana yang diperoleh dengan biaya bunga tetap yang diukur sebagai rasio antara modal jangka panjang yang dipinjam dengan total modal yang digunakan. *Leverage* diharapkan menghasilkan lebih banyak dari dana yang diinvestasikan daripada biaya yang harus dikeluarkan sehingga meningkatkan pendapatan pemilik. Kaur (2018) menyatakan bahwa *leverage* dalam konteks bisnis mengacu pada penggunaan ekuitas milik sendiri atau pinjaman untuk membiayai pembelian aset bisnis. *Leverage* dapat meningkatkan *return on equity* perusahaan tetapi juga bisa menjadi ancaman jika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban bunga tetap.

Komponen utama dalam teori *leverage* meliputi utang, ekuitas, biaya utang, dan biaya ekuitas. Tujuan utama teori *leverage* adalah untuk menjelaskan

bagaimana penggunaan utang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan pengembalian bagi pemegang saham. Teori ini juga bertujuan untuk menemukan struktur modal yang optimal yang meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Hubungan antara utang dan ekuitas dalam teori *leverage* menggambarkan bagaimana penggunaan utang dapat meningkatkan pengembalian ekuitas selama pengembalian investasi lebih besar dari biaya utang. Peningkatan *leverage* juga meningkatkan risiko kebangkrutan dan biaya keuangan lainnya. Potensi konflik dalam penggunaan *leverage* termasuk risiko kebangkrutan, peningkatan biaya bunga dan potensi pengelolaan laba untuk memenuhi kewajiban utang. Masalah ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan.

Debt-to-Equity Ratio (DER) adalah rasio keuangan yang mengukur proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aset dan operasinya. Menurut Wiranawata (2022), *DER* digunakan untuk menganalisis laporan keuangan dengan menunjukkan berapa banyak modal sendiri yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk utang. Rasio ini sangat penting karena menunjukkan tingkat risiko finansial yang dihadapi perusahaan.

DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang dibandingkan ekuitas untuk mendanai asetnya, yang dapat meningkatkan potensi pengembalian tetapi juga meningkatkan risiko kebangkrutan. Sebaliknya *DER* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih sedikit utang dibandingkan ekuitas, yang mengurangi risiko

kebangkrutan tetapi juga dapat membatasi potensi pengembalian. *DER* adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Tingkat *DER* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan utang untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi tetapi juga menandakan peningkatan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik (Iqbal et al., 2020). Stabilitas finansial perusahaan juga dapat ditunjukkan melalui *DER* yang seimbang. Perusahaan dapat lebih mudah menghadapi tantangan keuangan dan ekonomi yang tidak terduga apabila mengelola utang dan ekuitas secara efektif, misalnya Haliza et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan kualitas aset penghasilan (*Earning Asset Quality*) memiliki pengaruh signifikan terhadap *DER*, menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset dalam mempertahankan stabilitas keuangan perusahaan.

DER juga digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk membuat keputusan strategis. Rasio ini membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas penggunaan utang dan menentukan strategi keuangan yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. *DER* juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor di industri yang sama. Kekuatan *DER* adalah memberikan indikator yang jelas tentang tingkat *leverage* perusahaan serta membantu dalam analisis risiko dan keputusan investasi, namun *DER* memiliki kelemahan karena tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar utangnya. Oleh karena itu, *DER* perlu dilengkapi dengan rasio

lainnya seperti *Interest Coverage Ratio*. Studi oleh Cincinelli et al. (2021) menemukan bahwa *pro-siklikalitas leverage* dapat meningkatkan risiko sistemik terutama selama krisis keuangan dan pembatasan kebijakan moneter. Penelitian oleh Iqbal et al. (2020) menunjukkan bahwa *leverage finansial*, diukur dengan *DER*, dapat merugikan inovasi *input* seperti *R&D* tetapi mendorong inovasi *output* seperti paten di perusahaan China.

Pengaruh *DER* terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek. Kurnianti et al. (2022) menemukan bahwa *DER* memiliki pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan tekstil dan garmen di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa *investor* memperhatikan rasio *DER* dalam menilai risiko dan potensi pengembalian investasi mereka. Studi oleh Utari (2023) menunjukkan bahwa *DER* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih pada subsektor *pulp & paper*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *DER* terhadap kinerja keuangan dapat bervariasi tergantung pada sektor industri yang bersangkutan. Nainggolan et al. (2023) menemukan bahwa *DER* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, namun memiliki pengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Ini menunjukkan bahwa meskipun *DER* mungkin tidak secara langsung mempengaruhi nilai perusahaan, namun dapat mempengaruhi persepsi *investor* dan harga saham. Rizky dan Aryani (2020) menunjukkan bahwa *DER* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perubahan laba pada perusahaan konstruksi dan bangunan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan *DER* dapat meningkatkan risiko finansial yang dapat berdampak negatif pada laba perusahaan.

Teori *leverage* menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan utang untuk meningkatkan nilai perusahaan dan pengembalian bagi pemegang saham namun juga memperkenalkan risiko tambahan seperti kebangkrutan dan peningkatan biaya bunga. *DER* adalah salah satu rasio utama yang digunakan untuk mengukur *leverage* dan memberikan wawasan penting tentang struktur modal perusahaan. Teori ini dapat diterapkan dalam pengembangan strategi keuangan perusahaan untuk mengoptimalkan struktur modal dan meningkatkan nilai perusahaan, terutama dalam industri dengan potensi pertumbuhan tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak *leverage* dalam berbagai konteks ekonomi dan industri serta untuk menemukan cara-cara inovatif untuk memitigasi risiko yang terkait dengan *leverage* tinggi.

h. Umur Perusahaan

Umur perusahaan merujuk pada lamanya waktu perusahaan berdiri dan beroperasi sejak didirikan. Penelitian mengenai umur perusahaan penting untuk memahami bagaimana faktor ini mempengaruhi berbagai aspek kinerja perusahaan termasuk pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Umur perusahaan sering kali digunakan sebagai indikator stabilitas dan pengalaman perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, stabilitas dan pengalaman ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kapasitas perusahaan untuk mengelola risiko dan menghadapi dinamika pasar.

Stabilitas dan pengalaman yang diukur melalui umur perusahaan memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam berbagai kondisi pasar dan

mengelola operasional dengan lebih efisien seiring berjalannya waktu (Permadani & Kusumawati, 2022). Pengukuran ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memperkuat posisinya di pasar. Pengukuran umur perusahaan sering kali digunakan dalam penelitian untuk menilai dampak umur terhadap inovasi dan daya saing perusahaan, misalnya perusahaan yang lebih tua memiliki jaringan yang lebih kuat dan hubungan yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan, hal ini yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam industri mereka.

Penelitian oleh Adila dan Syofyan (2016) menemukan bahwa semakin lama umur perusahaan, semakin berpengalaman perusahaan tersebut dalam menangani berbagai tantangan bisnis. Pengalaman ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas manajemen risiko dan pengungkapan *sustainability report* (Adila & Syofyan, 2016). Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki mekanisme yang lebih matang untuk mengatasi krisis dan memanfaatkan peluang. Umur perusahaan juga dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik sumber daya manusia, di mana perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki program pelatihan dan pengembangan yang lebih baik bagi karyawan mereka yang dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan.

Pengukuran umur perusahaan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang stabilitas dan reputasi perusahaan di mata publik. Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki reputasi yang lebih kuat dan stabilitas operasional yang lebih baik yang dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan memfasilitasi hubungan bisnis yang lebih baik (Sidiq et al., 2021). Reputasi yang baik tidak

hanya membantu dalam menarik *investor* dan pelanggan tetapi juga dalam menjalin hubungan yang kuat dengan pihak regulator dan komunitas lokal. Perusahaan yang telah lama berdiri sering kali dianggap lebih dapat diandalkan dan bertanggung jawab, yang dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan.

Umur perusahaan sebagai indikator stabilitas dan pengalaman memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien dan bertahan lebih lama di pasar yang kompetitif (Tjandrapurnama, 2023). Studi menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih tua memiliki keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi operasional dan daya tahan bisnis. Pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun beroperasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses yang lebih efisien dan strategi yang lebih efektif untuk menghadapi persaingan. Umur perusahaan juga dapat dibandingkan dengan teori *lifecycle* perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan melalui berbagai tahap perkembangan, dari *startup* hingga *maturity* dimana masing-masing tahap mempengaruhi kinerja dan pengungkapan *sustainability report* (Yuliandhari & Citta, 2024). Teori *lifecycle* ini menggambarkan bagaimana kebutuhan dan prioritas perusahaan berubah seiring dengan perkembangan usia dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi strategi bisnis dan pelaporan keberlanjutan.

Umur perusahaan dihitung dari tahun berdirinya hingga tahun penelitian dilakukan dan sering digunakan sebagai indikator stabilitas dan pengalaman perusahaan. Pengukuran ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana perusahaan telah berkembang dan beradaptasi dalam industrinya.

Pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun beroperasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan praktik terbaik dalam manajemen risiko dan pengungkapan keberlanjutan. Pemahaman ini penting untuk mengetahui bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diungkapkan dalam *sustainability report*. Perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kapabilitas untuk melaksanakan dan melaporkan inisiatif keberlanjutan secara efektif, yang dapat mencerminkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Perusahaan yang telah lama berdiri juga memiliki kesempatan untuk membangun budaya perusahaan yang kuat, yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pemahaman akan pentingnya umur perusahaan dan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kinerja, termasuk pengungkapan *sustainability report* akan membuat perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka lebih baik untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Evaluasi yang komprehensif terhadap umur perusahaan memberikan wawasan yang berharga tentang kapasitas perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Herawaty et al. (2021) dalam penelitian berjudul "*Peran Profitabilitas atas Pengaruh Board Governance terhadap Sustainability report Quality*" mengeksplorasi pengaruh faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran dewan direksi,

proporsi komisaris independen, usia anggota dewan, dan keterlibatan perempuan di dewan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Metode analisis regresi berganda yang digunakan menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran dewan direksi dan keterlibatan perempuan di dewan memiliki dampak positif signifikan terhadap kualitas laporan. Sebaliknya, proporsi komisaris independen dan usia anggota dewan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa kehadiran komisaris independen mungkin tidak cukup untuk memastikan laporan keberlanjutan yang berkualitas.

Trisnawati et al. (2022) melalui penelitian "*Influence of Majority Ownership, Profitability, Size of the Board of Directors, and Frequency of Board of Commissioners Meetings on Sustainability report Disclosure*" mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki dampak positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Ukuran dewan yang lebih besar mungkin menyediakan lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk menangani isu keberlanjutan. Kepemilikan mayoritas, profitabilitas dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa elemen-elemen ini mungkin tidak memainkan peran utama dalam kebijakan pengungkapan keberlanjutan.

Saepudin (2021) dalam studi berjudul "*Analysis Of Factors Influencing The Sustainability report Disclosure*" menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti regulasi eksternal atau tekanan

dari pemangku kepentingan, mungkin lebih berperan dalam menentukan sejauh mana perusahaan bersedia mengungkapkan informasi keberlanjutan mereka.

Febriyanti (2021), dalam penelitian "*Factors Affecting Sustainability reporting Disclosure*", menemukan bahwa kehadiran wanita di dewan direksi dan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini menggambarkan pentingnya diversitas gender dan stabilitas finansial dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Faktor lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menunjukkan bahwa ada variabel lain yang perlu dipertimbangkan untuk mendorong pengungkapan yang lebih luas.

Susilawati et al. (2022), dalam studi "*The Effect of Leverage and Good Corporate Governance on Sustainability report Disclosure*", menemukan bahwa hanya proporsi komisaris independen yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan independen penting untuk meningkatkan transparansi meskipun elemen lain dari tata kelola perusahaan mungkin tidak cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan pengungkapan.

Ho et al. (2023) dalam studi mereka yang berjudul "*The Influence of Leverage, Independent Commissioners, Company Activities and Profitability on Sustainability report Disclosures*" menemukan bahwa *leverage*, komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya tekanan finansial dan pengawasan eksternal dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Aktivitas perusahaan, bagaimanapun tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Ardi (2020) dalam penelitian "*Profitability, Leverage, and Size on Environmental Disclosure*" menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan lebih cenderung mengungkapkan informasi lingkungan. *Leverage* yang tinggi, sebaliknya mengurangi kecenderungan untuk pengungkapan ini, yang mungkin menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban hutang tinggi lebih fokus pada stabilitas finansial daripada keberlanjutan.

Farisyi et al. (2022) dalam tinjauan literatur berjudul "*Systematic Literature Review: Determinants of Sustainability reporting in Developing Countries*" menemukan bahwa faktor-faktor seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh yang bervariasi tergantung pada konteks negara dan industri, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam mempromosikan praktik pelaporan keberlanjutan di negara berkembang.

Indrianingsih & Agustina (2020) dalam penelitian "*The Effect of Company Size, Financial Performance, and Corporate Governance on the Disclosure of Sustainability report*" mengungkap bahwa *leverage* memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan sementara likuiditas dan komite audit berdampak positif, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik dan pengawasan ketat lebih cenderung transparan dalam pengungkapan keberlanjutan mereka.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
1	Peran Profitabilitas atas Pengaruh <i>Board Governance</i> terhadap <i>Sustainability report Quality</i>	Herawaty et al., 2021	Laporan Keberlanjutan	X1:Profitabilitas, X2:Ukuran Dewan Direksi, X3: Proporsi Komisaris Independen, X4: Usia Anggota Dewan, X5: Perempuan di Dewan	Regresi Berganda	X1: Profitabilitas berpengaruh positif. X2: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif. X3: Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh. X4: Usia anggota dewan tidak berpengaruh. X5: Keterlibatan perempuan di dewan berpengaruh positif.
2	<i>The Effect of Good Corporate Governance and Sustainability report on Company Performance</i>	Riyadi, 2023	Laporan Keberlanjutan	X1: Kepemilikan Manajerial, X2: Kepemilikan Institusional, X3: Proporsi Komisaris Independen, X4: Komite Audit, X5:Profitabilitas, X6: <i>Leverage</i>	Regresi Berganda	X1: Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. X2: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh. X3: Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh. X4: Komite audit berpengaruh positif. X5: Profitabilitas tidak berpengaruh. X6: <i>Leverage</i> tidak berpengaruh.

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
3	<i>Influence of Majority Ownership, Profitability, Size of the Board of Directors, and Frequency of Board of Commissioners Meetings on Sustainability report Disclosure</i>	Trisnawati et al., 2022	Laporan Keberlanjutan	X1: Kepemilikan Mayoritas, X2: Profitabilitas, X3: Ukuran Dewan Direksi, X4: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	Regresi Berganda	X1: Kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh. X2: Profitabilitas tidak berpengaruh. X3: Ukuran dewan direksi berpengaruh positif. X4: Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh.
4	<i>The Impact of Managerial Ownership on Sustainability report</i>	Junias et al. (2021)	Laporan Keberlanjutan	X1: Kepemilikan Manajerial	Regresi Moderasi Murni	X1: kepemilikan manjerial berpengaruh positif
5	<i>The Effect of Firm Size and Firm Age on Sustainability reporting and The Impact on Earnings Management</i>	Fadilah, Uzliawati, & Mulyasari (2022)	laporan Keberlanjutan	X1: Ukuran Perusahaan X2: Umur Perusahaan	Regresi Linier Berganda	X1:Ukuran Perusahaan berpengaruh positif X2: Umur perusahaan berpengaruh positif
6	<i>Analysis Of Factors Influencing The Sustainability report Disclosure</i>	Saepudin, 2021	Laporan Keberlanjutan	X1: Ukuran Dewan Komisaris, X2: Proporsi Komisaris Independen, X3: Kepemilikan Manajerial, X4: Profitabilitas	Regresi Data Panel	X1: Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh. X2: Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh. X3: Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. X4: Profitabilitas tidak berpengaruh.
7	<i>The Impact of Firm Size, Leverage, Firm Age, Media Visibility and Profitability</i>	Maryana & Carolina (2021)	Laporan Keberlanjutan	X1:Ukuran Perusahaan X2:Leverage X3:Umur Perusahaan X4:Visibilitas Media,	Regresi Linier Berganda	X1&X4:Ukuran perusahaan dan visibilitas media tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
	<i>on Sustainability report Disclosure</i>			X5:Profitabilitas		X2&X3: Leverage dan umur perusahaan memiliki dampak negatif signifikan X5:Profitabilitas memiliki dampak positif signifikan.
8	<i>Factors Affecting Sustainability reporting Disclosure</i>	Febriyanti, 2021	Laporan Keberlanjutan	X1: Umur Perusahaan, X2: Kehadiran Wanita di Dewan Komisaris, X3: Kehadiran Wanita di Dewan Direksi, X4: Profitabilitas, X5: <i>Leverage</i>	Regresi Berganda	X1: Umur perusahaan tidak berpengaruh. X2: Kehadiran wanita di dewan komisaris tidak berpengaruh. X3: Kehadiran wanita di dewan direksi berpengaruh positif. X4: Profitabilitas tidak berpengaruh. X5: <i>Leverage</i> berpengaruh positif.
9	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Pengungkapan laporan keberlanjutan	Nurrahman & Sudarno, 2018	Laporan Keberlanjutan	X1:Kepemilikan Manajerial X2:Kepemilikan Institusional X3:Kepemilikan Asing	Multivariate Analysis	X1: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif X2&X3:Kepemilikan Institusional dan Asing berpengaruh positif
10	<i>Pengaruh Good Corporate Governance terhadap</i>	Madona & Khafid, 2020	Laporan keberlanjutan	X1:Komisaris Independen Z:Ukuran Perusahaan	Regresi Linear	X1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
	<i>Pengungkapan Sustainability report dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi</i>					laporan kebelanjutan
11	<i>The Effect of Leverage and Good Corporate Governance on Sustainability report Disclosure</i>	Susilawati et al., 2022	Laporan Keberlanjutan	X1: <i>Leverage</i> , X2: Jumlah Dewan Komisaris, X3: Jumlah Komite Audit, X4: Proporsi Komisaris Independen	Regresi Berganda	X1: <i>Leverage</i> tidak berpengaruh. X2: Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh. X3: Jumlah komite audit tidak berpengaruh. X4: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif.
12	<i>The Influence of Leverage, Independent Commissioners, Company Activities and Profitability on Sustainability report Disclosures</i>	Ho et al., 2023	Laporan Keberlanjutan	X1: <i>Leverage</i> , X2: Komisaris Independen, X3: Aktivitas Perusahaan, X4: Profitabilitas	Penelitian Eksplanatori	X1: <i>Leverage</i> berpengaruh positif. X2: Komisaris independen berpengaruh positif. X3: Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh. X4: Profitabilitas berpengaruh positif.
13	<i>The Effect of Profitability, Company Size, and Good Corporate Governance on Sustainability reports</i>	Virda 2023	Laporan Keberlanjutan	X1: Profitabilitas, X2: Ukuran Perusahaan, X3: Tata Kelola Perusahaan (Dewan Komisaris Independen, Komite Audit,	Regresi Panel Data	X1: Profitabilitas berpengaruh negatif, X2&X3: Ukuran perusahaan dan tata kelola tidak berpengaruh

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
				Kepemilikan Institusional)		
14	<i>Systematic Literature Review: Determinants of Sustainability reporting in Developing Countries</i>	Farisyi et al., 2022	Laporan Keberlanjutan	X1: Ukuran Perusahaan, X2: Profitabilitas, X3: <i>Leverage</i> , X4: Struktur Tata Kelola Perusahaan, X5: Struktur Kepemilikan, X6: Umur Perusahaan, X7: Sektor Industri, X8: Postur Perusahaan, X9: Kualifikasi dan Pengalaman Dewan	Tinjauan Literatur	X1: Ukuran perusahaan memiliki hasil campuran. X2: Profitabilitas memiliki hasil campuran. X3: <i>Leverage</i> memiliki hasil campuran. X4: Struktur tata kelola perusahaan memiliki hasil campuran. X5: Struktur kepemilikan memiliki hasil campuran. X6: Umur perusahaan memiliki hasil campuran. X7: Sektor industri memiliki hasil campuran. X8: Postur perusahaan memiliki hasil campuran. X9: Kualifikasi dan pengalaman dewan memiliki hasil campuran.
15	<i>The Effect of Company Size, Financial Performance, and Corporate Governance on the Disclosure of Sustainability report</i>	Indrianingsih & Agustina, 2020	Laporan Keberlanjutan	X1: Ukuran Perusahaan, X2: Profitabilitas, X3: <i>Leverage</i> , X4: Likuiditas, X5: Aktivitas Perusahaan, X6: Dewan Direksi,	Regresi Berganda	X1: Ukuran tidak berpengaruh. X2: Profitabilitas tidak berpengaruh. X3: <i>Leverage</i> berpengaruh negatif. X4: Likuiditas berpengaruh positif. X5: tidak berpengaruh.

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
				X7: Komisaris Independen, X8: Komite Audit		X6: Dewan direksi tidak berpengaruh. X7: Komisaris independen tidak berpengaruh. X8: tidak berpengaruh
16	Analysis of Good Corporate Governance, Financial Performance and <i>Sustainability report</i>	Latifah et al (2019)	Laporan Keberlanjutan	X1: Managerial Ownership, X2: Independent Commissioner Board, X3: Board of Directors, X4: Independent Audit Committee	Multiple Linear Regression	X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap Y
17	Corporate Governance Mechanism, Company Size Financial Performance and <i>Sustainability reporting</i>	Hardika, Manurung, dan Mulyati (2018)	Laporan Keberlanjutan	X1: Managerial Ownership, X2: Independent Commissioner, X3: Audit Committee, X4: Company Size, X5: Financial Performance	Logistic Regression	X1, X2, X3, X4, X5 berpengaruh negatif terhadap Y.
18	The Moderating Effects of Social-Sustainability on Corporate Characteristics' Relationship with Environmental- <i>Sustainability reporting</i>	Haladu, D. (2018)	Environmental <i>Sustainability reporting</i>	X1: Firm Age, X2: Audit Firm, X3: Effective Tax Rate	Stata 13 Analysis	X1, X2, dan X3 berpengaruh Positif terhadap Y.

Lanjutan

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Metode Analisis	Hasil
19	Firm Value and the Quality of Sustainability reporting in Australia	Bachoo, K., Tan, R., & Wilson, M. (2019)	Laporan Keberlanjutan	X1: Firm Age	Multiple Regression	X1 Berpengaruh negatif terhadap Y

Sumber : Data diolah 2024

C. Perumusan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh berbagai faktor terhadap nilai perusahaan di industri barang konsumen primer. Berdasarkan tinjauan pustaka, kami merumuskan hipotesis yang didukung oleh temuan penelitian sebelumnya. Dasar hipotesis ini didasarkan pada faktor-faktor yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka, yaitu analisis laporan keuangan, pengungkapan informasi keberlanjutan, *managerial ownership*, kinerja pasar dan struktur modal perusahaan.

1. Kepemilikan Manajerial Terhadap Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer

Kepemilikan manajerial menekankan bahwa kepemilikan saham oleh manajer atau eksekutif perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan mereka dengan pemegang saham, mengurangi konflik *agency*, dan mendorong manajer untuk fokus pada kinerja jangka panjang perusahaan. Kepemilikan ini memberikan insentif finansial langsung bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mempengaruhi keputusan investasi, kebijakan keuangan, dan strategi bisnis.

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai alat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Manajer yang juga pemegang

saham cenderung berusaha meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan, karena keuntungan finansial mereka terkait langsung dengan performa perusahaan. Manajer dengan kepemilikan saham memiliki insentif untuk memastikan keberhasilan finansial dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang sering kali tercermin dalam kualitas laporan keberlanjutan perusahaan. Kepemilikan saham mendorong manajer untuk lebih transparan dan proaktif dalam mengungkapkan inisiatif keberlanjutan.

Penelitian oleh Junias et al. (2021) dan Latifah et al. (2019) mendukung hipotesis bahwa kepemilikan manajerial meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer berkontribusi positif terhadap kualitas laporan tersebut, karena manajer yang juga pemegang saham lebih termotivasi untuk memastikan perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, selaras dengan kepentingan mereka dalam keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan di industri barang konsumen primer.

2. Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer

Dewan komisaris independen berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan perusahaan. Mereka memastikan perusahaan mematuhi standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan menyajikan informasi yang lebih lengkap terkait isu lingkungan,

sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*). Studi menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam komite audit meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap laporan keberlanjutan.

Dewan komisaris independen berperan krusial dalam meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Dengan independensi mereka, komisaris independen dapat menilai kebijakan dan laporan perusahaan secara objektif, memastikan laporan keberlanjutan disusun sesuai standar seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* dan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Pengawasan ketat oleh komisaris independen juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*), yang meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Dengan demikian, komisaris independen berkontribusi signifikan terhadap praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian, termasuk Susilawati et al. (2022) dan Ho et al. (2023), mendukung hipotesis bahwa dewan komisaris independen berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan, dengan menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan. Meningkatkan proporsi dewan komisaris independen dalam dewan komisaris secara konsisten dianggap sebagai strategi efektif untuk memperkuat kualitas pelaporan keberlanjutan, mendukung hipotesis positif tersebut.

H2: Proporsi dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan di industri barang konsumen primer.

3. Profitabilitas Terhadap Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dan kesehatan finansial perusahaan (*Tehrani et al., 2016*). Ukuran seperti *Return on Assets (ROA)* digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan (*Purwanti, 2019*). Dalam konteks laporan keberlanjutan, profitabilitas penting karena memungkinkan perusahaan mendanai inisiatif keberlanjutan seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan atau program sosial (*Haliza et al., 2021*).

Berdasarkan teori dapat disimpulkan bahwa Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan dan insentif untuk berinvestasi dalam praktik keberlanjutan. Dengan sumber daya finansial yang memadai, mereka dapat menerapkan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung inisiatif sosial. Stabilitas finansial dari profitabilitas memungkinkan perusahaan untuk proaktif dalam menghadapi regulasi lingkungan yang ketat dan tuntutan pemangku kepentingan untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, profitabilitas yang kuat tidak hanya menguntungkan pemegang saham tetapi juga mendorong komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. *Herawaty et al. (2021)* menemukan bahwa perusahaan yang lebih *profitabel* cenderung memiliki

laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan transparan. Sulistyaguna et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak positif pada pelaporan keberlanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan dengan kondisi keuangan yang kuat lebih cenderung terlibat dalam praktik berkelanjutan, mendukung hipotesa bahwa profitabilitas mendukung keberlanjutan.

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan di industri barang konsumen primer.

4. *Leverage* Terhadap Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer

leverage memainkan peran penting dalam memperkuat kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas finansial dan mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang (Wiranawata, 2022). Dengan struktur modal yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan *leverage* untuk meningkatkan investasi dalam proyek-proyek keberlanjutan, yang pada akhirnya mendukung reputasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Iqbal et al., 2020).

Mempertimbangkan teori *leverage*, penggunaan utang yang lebih besar (*leverage* yang lebih tinggi) dapat memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan yang mendukung keberlanjutan, seperti investasi dalam teknologi hijau atau proyek sosial, hal ini karena *leverage* memungkinkan perusahaan untuk memiliki lebih banyak modal untuk dialokasikan tanpa harus

mengorbankan kepemilikan ekuitas yang signifikan. *Leverage* tinggi membawa risiko kebangkrutan, hal ini juga bisa menjadi indikator bahwa perusahaan siap mengambil langkah besar untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Perusahaan dengan *leverage* yang lebih tinggi mungkin lebih termotivasi untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik melalui laporan keberlanjutan yang lebih baik sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko mereka.

Ho et al. (2023) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, menggarisbawahi pentingnya tekanan finansial dan pengawasan eksternal dalam mendorong perusahaan untuk lebih transparan. Selain itu, Efita (2022) dan Sulistyaguna et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa *leverage* mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih cenderung melakukan pengungkapan keberlanjutan untuk menarik investor dan pemangku kepentingan, serta mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada utang.

H4: *Leverage* berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan di industri barang konsumen primer.

5. Umur Perusahaan Terhadap Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Industri Barang Konsumen Primer

Umur perusahaan sering kali digunakan sebagai indikator stabilitas dan pengalaman, yang memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan memperkuat posisinya di pasar (Permadani &

Kusumawati, 2022). Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki mekanisme yang lebih matang untuk mengatasi krisis dan memanfaatkan peluang, serta program pelatihan dan pengembangan yang lebih baik bagi karyawan (Adila & Syofyan, 2018). Selain itu, reputasi yang kuat dan stabilitas operasional dari perusahaan yang lebih tua dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan memfasilitasi hubungan bisnis yang lebih baik (Sidiq et al., 2021).

Berdasarkan informasi di atas, logika yang mendukung hipotesis bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* adalah bahwa perusahaan yang lebih tua cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dan pengalaman yang lebih luas dalam manajemen operasional dan risiko. Pengalaman ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam pelaporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan yang lebih tua umumnya memiliki reputasi yang lebih kuat dan hubungan yang lebih baik dengan stakeholder, yang dapat meningkatkan insentif untuk transparansi dalam pengungkapan *sustainability report*. Dengan demikian, umur perusahaan dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai kemampuan dan komitmen perusahaan dalam mengelola dan melaporkan aspek-aspek keberlanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan positif antara umur perusahaan dan kualitas laporan keberlanjutan. Fadilah et al. (2022) menemukan bahwa perusahaan yang lebih tua cenderung mengungkapkan informasi lingkungan secara lebih transparan, didukung oleh stabilitas dan pengalaman yang lebih besar. Perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan, yang

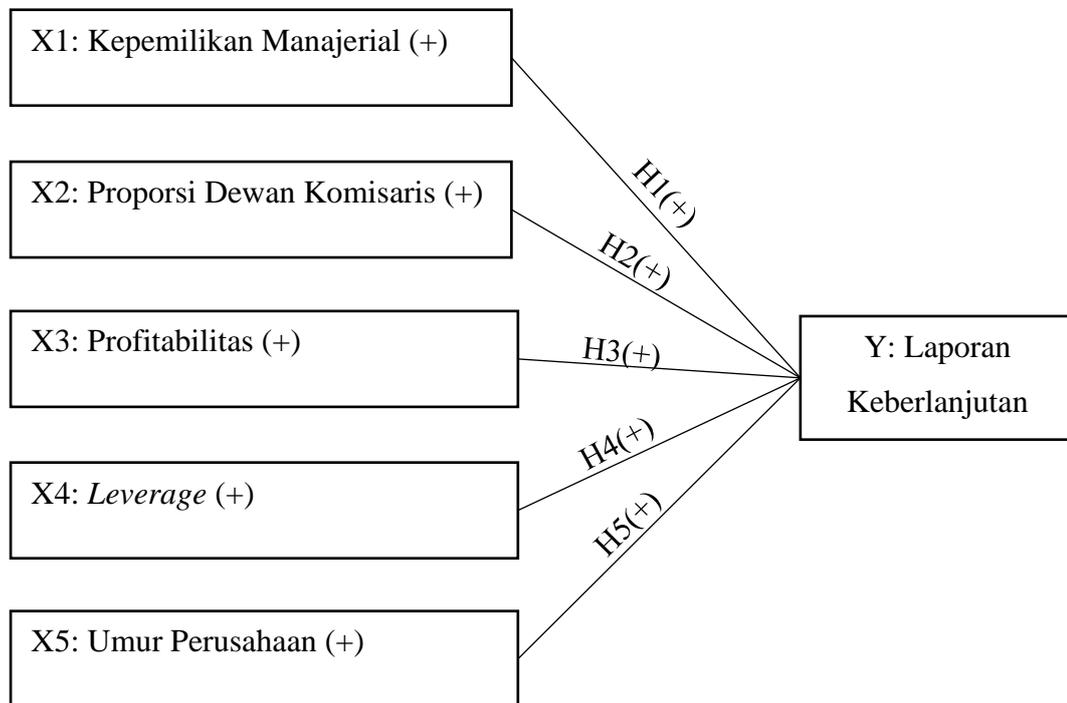
biasanya juga lebih tua, lebih cenderung melaporkan upaya keberlanjutan. Penelitian Haladu (2018) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa umur perusahaan berkontribusi positif terhadap pelaporan keberlanjutan lingkungan.

H5: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap laporan keberlanjutan di industri barang konsumen primer.

D. Model Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh *managerial ownership*, umur perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *sustainability report*: studi empiris di industri barang konsumen yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

H1 : *Managerial ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan Laporan keberlanjutan

H2 : Proporsi dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan keberlanjutan

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan keberlanjutan

H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan keberlanjutan

H5 : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan keberlanjutan